KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggota DPR usulkan program
Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

ASPIRASI DAPIL

Anggota DPR Usulkan Program

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan program pembangunan di daerah pemilihan masing-masing tidak akan menerima kucuran dana. Hak anggota Dewan dalam memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihannya hanya terbatas pada usulan program.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1). "Kami memang masih akan membicarakan teknis implementasi hak tersebut seperti apa. Namun, yang pasti bentuknya bukan dalam bentuk dana untuk setiap anggota DPR," kata Fadli.

Hak tersebut, ujar Fadli, berbeda dengan wacana dana aspirasi yang pernah bergulir pada 2010. Saat itu, Fraksi Partai Golkar di DPR mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi anggota DPR yang mengusulkan program pembangunan di dapil masing-masing.

"Berbeda dengan aspirasi, hak ini hanya sebatas usulan program pembangunan. Tidak ada uang atau jatah dana untuk program yang diusulkan. Usulan-usulan itu nantinya disinkronisasikan dengan program pemerintah. Bisa ditolak, bisa diterima," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan.

> **Tidak ada uang atau jatah dana untuk program yang diusulkan.**
> Taufik Kurniawan

Meskipun usulan diajukan, ujar Taufik, keputusan final tetap diserahkan kepada pemerintah. Apabila postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah tidak memungkinkan, DPR tak dapat memaksakan usulannya agar mendapat jatah dana pembangunan.

Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil tersebut diatur dalam Pasal 195 Ayat 1-9 Tata Tertib DPR 2014-2019 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rapat paripurna kedua masa persidangan II tahun sidang 2014-2015, Kamis (15/1), sebanyak 50 program pembangunan diusulkan sekitar 30 anggota DPR. Usulan itu kini ditampung di Sekretariat Jenderal DPR.

Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi PAN Totok Sudaryanto menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Tata Tertib DPR, setelah anggota DPR mendaftarkan usulan program ke Sekretariat Jenderal DPR, pimpinan DPR meneruskan usulan itu ke komisi terkait untuk dibahas bersama mitra kerja. Hasil pembahasan di setiap komisi lalu disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan.

Badan Anggaran, lanjut Totok, selanjutnya menyampaikan hasil sinkronisasi tersebut ke komisi terkait. Komisi kemudian memberitahukan hasil dari usulan itu kepada anggota DPR pengusul.

DPR telah mengadakan rapat pengganti Badan Musyawarah pada Senin lalu dan membentuk tim kecil untuk mengatur mekanisme penerapan 50 usulan program pembangunan itu. Targetnya, langkah-langkah teknis itu sudah harus diatur sebelum pembahasan APBN Perubahan dengan pemerintah, Februari mendatang.

"Hak ini sebenarnya memperkuat fungsi anggota DPR yang harus merepresentasikan konstituennya," kata Totok, yang mengajukan program perbaikan jembatan rusak di dapilnya, Malang, Jawa Timur. (AGE)